

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Azhar, Muhammad Nur, 2012, *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek, Jakarta.
- Army, Eddy, 2020, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Budhijanto, Danrivanto, 2019, *Cyber Law & Revolusi Industri 4.0*, Logoz Publishing, Bandung.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok.
- Fakhriah, Efa Laela, 2017, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Fuady, Munir, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2022, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamid, A.T, 1986, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kemitraan Partnership dan IDLO, 2019, *Penerimaan Bukti Elektronik di Persidangan*, Modul TOT Hakim Mahkamah Agung, Kemitraan, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Makarim, Edmon, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Mamudji, Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.



- R. Tjitrosudibio, Subekti, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ramli, Ahmad M., 2007, *Menuju Kepastian Hukum Dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informasi, Jakarta.
- Siregar, Harli dan Sakafa Guraba, 2023, *Admisibilitas Bukti Elektronik dalam Persidangan*, Rajawali Press, Depo.
- Sasangka, Hari, 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Subekti, 2007, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Intermasa, Jakarta.
- _____, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.
- Subekti, R, 1983, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sutianto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2019, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandar Maju, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.
- Soeroso, R., 2011, *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)*. Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, 2010, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1988, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Syahrin, Alvi, 2011, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Sofmedia, Medan.
- Ustadianto, Rieke, 2002, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta.



Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboekvoor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
Staatsblad 1847-23, sebagaimana telah diubah beberapa kali.

Het Herzien Indonesisch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui).
Staatsblad 1926-559 jo. 1941-44. sebagaimana telah diubah beberapa kali.

Rechregkement Buitengewesten (Rbg) Staatblad 1927-227.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039).

Putusan

Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 3140/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Putusan Pengadilan Agama Pelaihari No. 7/Pdt.G/2022/PA.Plh

Putusan Pengadilan Agama Pelaihari No.424/Pdt.P/2021/PA.Plh

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb.



Pedoman Pelaksana

ISO/IEC 27037:2012 tentang *Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence* melalui SK Penetapan Badan Standardisasi Nasional (BSN) No. 37/KEP/BSN/3/2014 diadopsi menjadi SNI ISO/IEC 27037:2014 tentang Pedoman Identifikasi, Pengumpulan, Akuisisi dan Preservasi Bukti Digital, dan kemudian dikuatkan melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Panduan Identifikasi, Koleksi, Akuisisi dan Preservasi Bukti Digital

Makalah/Skripsi/Tesis

Abdullah, 2008. “Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan” *Tesis*. Tidak dipublikasikan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo.

Budyatmika, Bernardus Ageng 2023, “Keabsahan CCTV Sebagai Bukti dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Persidangan”, *Skripsi*, Tidak Dipublikasikan, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Citra, Aulia, 2022, “Keabsahan Dokumen Elektronik Pengesahan Badan Hukum Yayasan oleh Kemenkumham Secara Elektronik”, *Tesis*, Tidak Dipublikasikan, Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta.

Fakhriah, Efa Laela 2009, “Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” *Makalah* pada Seminar Kerjasama Antara Balitbangdiklat Kumdil MA RI Dengan Perguruan Tinggi, Bandung.

Minanoer Rachman, 2012, “Penggunaan Informasi atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi”, *Bahan Seminar Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Jened, Rahmi, 2001, “Perlindungan Merek dalam Transaksi E-commerce melalui Domain”, *Laporan Penelitian*, Daftar Isian Kegiatan Rutin Universitas Airlangga, Surabaya.

Jurnal Internet

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema*

- Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 7. No. 1. hlm. 20-33.
- Daud, Ahmad S. 2013, “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi”, *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. II, No. 1, hlm. 104.
- Letsoin, V. 2010, “Pengakuan Tandatanganan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, *Jurnal Sasi*, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Vol. 16, No. 03, hlm. 57
- Makarim, Edmon, 2015, “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Vol 45, No, 4, hlm 509-571.
- Pelapu, Indah Julitah dkk, 2024, “Kepastian Hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris”, *Lex Privatum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vo. 14, No. 02, hlm. 2.
- Soroinda, Disriani Latifah dan Anandri Annisa Rinita Soroinda Nasution. 2022. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Vol. 52. No. 2. hlm. 384-405.
- Sonata, Depri Liber 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Vol. 8. No. 1. hlm. 15-35.
- Sondakh, England. 2019. Kekuatan Bukti Sumpah dalam Praktik Peradilan Perdata. *Lex Privatum*, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, Vol. VII. No. 1. hlm 83-89.
- Triyanti, 2015, “Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris, *Jurnal Repertorium*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Vol. II, No. 2, hlm 20 – 30.
- Wahyudi, Johan 2012, “Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan, *Perspektif*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Padang, Padang, Vol. XVII No. 2. hlm. 118-126.
- Wijayanta, Tata dan Sandra Dini Febri Aristya, 2014. Disparitas Putusan Perkara Tanah Terkait Penerapan Hukum Formil, *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, Vol. 7, No. 2. hlm. 173-195.
- Yuristha, RM. Egidius, dkk, 2019, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Eigenrichting Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 8, No. 3. hlm. 1969-1988.



Internet

Hidayati, Eka Fitri, 2020, Keabsahan Pembuktian Elektronik Dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Agama, [25/09/20], <https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20bahwa%20UU%20ITE,alat%20bukti%20di%20muka%20persidangan>, [03/05/2025]

Maarif, Syamsul, 2024, Masalah Alat Bukti Elektronik di Sidang Pengadilan, [24/07/24], <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-alat-bukti-elektronik-di-sidang-pengadilan-bagian-akhir-lt66a081e52d804?page=1>, [15/04/2025]

Nasir, Muhammad, 2023, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik pada Hukum Acara Perdata, [28/11/23], <https://pta-kaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-alat-bukti-elektronik-pada-hukum-acara-perdata/#:~:text=Kekuatan%20pembuktian%20lemah%20atau%20tidak,kepastian%20yang%20cukup%20pada%20hakim.&text=Alat%20bukti%20elektronik%20ialah%20Informasi,yang%20diatur%20dalam%20UU%20ITE>, [03/05/2025]

Sulistiyono, Happy Try, 2020. Prosedur Autentifikasi Alat Bukti Elektronik Pada Pemeriksaan Persidangan, [10/08/2020], <https://pn-sumedang.go.id/prosedur-autentifikasi-alat-bukti-elektronik-pada-pemeriksaan-persidangan>, [01/08/2024]

Wawancara:

A. Syarkawi, 2025, Proses Autentifikasi Dokumen Elektronik Serta Upaya Guna Menghindari Disparitas Dalam Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara, *Wawancara*, Yogyakarta, 12 Maret.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, 2025, Proses Autentifikasi Dokumen Elektronik Serta Upaya Guna Menghindari Disparitas Dalam Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara, *Wawancara*, Yogyakarta, 04 Maret.

Sri Sulastuti, 2025, Proses Autentifikasi Dokumen Elektronik Serta Upaya Guna Menghindari Disparitas Dalam Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara, *Wawancara*, Yogyakarta, 17 Maret.